BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan pada Bab IV, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalahsebagai berikut:

1. Gambaran empirik tentang perubahan kebijakan tentang pengangkatan Pengawas TK/SD di lingkungan Kantor Depdiknas Kabupaten Lebak berada pada katagori *sedang* (51.22%). Ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan Pengawas TK/SD di Kabupaten Lebak belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang baru.
2. Gambaran empirik kinerja Pengawas TK/SD di lingkungan Kantor Depdiknas Kabupaten Lebak menunjukkan berada pada taraf *sedang* (51.22%). Ini berarti bahwa tingkat kinerja Pengawas TK/SD di Kabupaten Lebak belum optimal sebagaimana yang diinginkan sesuai dengan tuntutan adanya perubahan kebijakan tentang jabatan pengawas sekolah.
3. Adanya perubahan kebijakan tentang jabatan Pengawas sekolah tersebut telah memberikan pengaruh yang kuat ke arah yang positif terhadap kinerja para Pengawas TK/SD di Kabupaten Lebak.
4. Derajat pengaruh perubahan kebijakan jabatan pengawas sekolah terhadap kinerja Pengawas TK/SD sebesar

59.60%. Ini berarti bahwa sebesar 59.60% perubahan yang terjadi pada kinerja Pengawas TK/SD di Kabupaten Lebak diperoleh dari hasil perubahan kebijakan tentang jabatan Pengawas sekolah.

Implikasi

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa implikasi sebagai bahan pengembangan kebijakan lebih lanjut, khususnya dalam melihat tingkat efektivitas perubahan kebijakan dalam pengangkatan jabatan pengawas sekolah, tampaknya perlu diketahui bagaimana kondisi kesiapan aparat pelaksana pada tingkat implementasi suatu kebijakan. Kondisi ini sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan perubahan kebijakan tersebut tidak merupakan bahasa politik (*political language*) yang pada tingkat operasional kurang dapat diimplementasikan. Atau, kebijakan tersebut masih bersifat *top-down* yang kurang didasarkan pada *grass-root approach* dalam bentuk optimalisasi *bottom-up planning*.

Secara khusus, implikasi dalam implementasi perubahan kebijakan tentang jabatan pengawas sekolah antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas perubahan kebijakan tentang jabatan pengawas sekolah, bukan hanya ditentukan oleh motivasi, fasilitas, persyaratan, kinerja pengawas yang diinginkan, dan dan prosedur implementasi kebijakan,

ditentukan pula oleh dukungan kesiapan aparat pelaksana kebijakan di lapangan. Kebijakan yang bersifat *top down* yang selama ini dilakukan akan senantiasa menemui kendala pada saat diimplementasikan.

2. Tugas pengawas sekolah yang selama ini cenderung pada pembinaan teknis administratif dan kurang memperhatikan aspek pembinaan teknis edukatif, sangat berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan pengawasan. Adanya perubahan kebijakan tersebut, dari sudut profesionaliasi tenaga kependidikan, merupakan salah satu upaya dalam menyiapkan tenaga pengawas sekolah yang dapat meningkatkan kinerja lebih profesional, sehingga tujuan-tujuan pendidikan sekolah dapat dicapai lebih efektif.
3. Hubungan antara perubahan kebijakan dengan aspek-aspek kinerja memang masih memerlukan waktu. Untuk itu, efektivitas implementasi perubahan kebijakan tentang pengawas sekolah tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, tersedianya sumber-sumber, dan karakteristik aparat pelaksana kebijakan di lapangan, baik secara internal maupun eksternal.
4. Pengembangan jabatan pengawas sekolah tidak hanya didasarkan pada analisis pekerjaan yang bersifat teknis, namun keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan kepengawasan ditunjang pula oleh keterampilan

yang bersifat hubungan antar manusia. Karena itu, kurikulum pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah, perlu ditunjang pula oleh materi-materi yang berkenaan dengan peningkatan keterampilan dalam berhubungan dengan manusia.

C. Saran

1. Dalam merekrut calon Pengawas TK/SD di lingkungan Kandep Diknas Kabupaten Lebak, perlu didukung oleh peningkatan pengertian, sikap dan tindakan nyata aparat pelaksana kebijakan yang sesuai dengan norma serta persyaratan jabatan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakan yang berlaku.
2. Untuk meningkatkan kinerja Pengawas TK/SD di Kabupaten Lebak, perlu dilakukan berbagai upaya, baik melalui melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan maupun melalui optimalisasi fungsi forum Kelompok Kerja Pengawas sekolah (KKPS) sebagai wadah pembinaan profesional Pengawas sekolah.
3. Disadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini belum menyentuh aspek permasalahan yang komprehensif. Karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan, terutama dalam: (1) Kesiapan aparat pelaksana kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan pengangkatan pengawas sekolah; (2) Faktor-faktor apakah yang lebih gamblang mempengaruhi kinerja dan
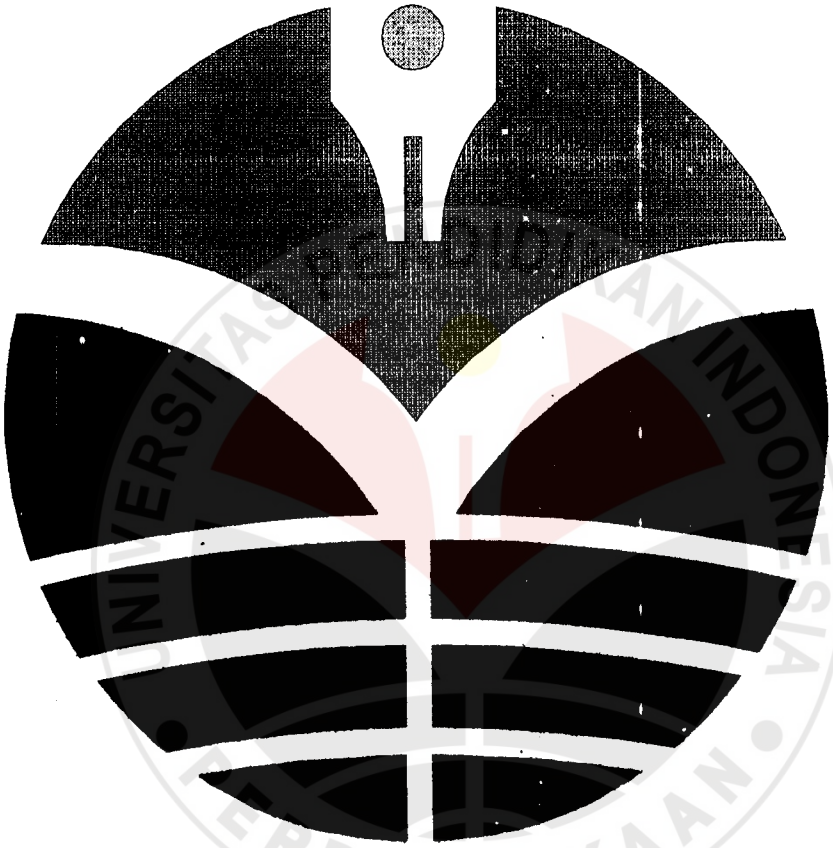
produktivitas Pengawas TK/SD dalam melaksanakan tugasnya; (3) Apakah mantan pejabat struktural yang diangkat Pengawas TK/SD tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kepengawasan teknis edukatif mengingat pendekatan struktural yang menjadi latar belakang kompetensi sangat berbeda dengan pendekatan fungsional? (4) Apakah pada usia yang relatif mendekati pensiun memiliki moral dan semangat kerja untuk melaksanakan proses pembinaan dan bantuan profesional terhadap guru-guru dalam meningkatkan mutu pendidikan? (5) Apakah jabatan Pengawas Sekolah tersebut kurang menarik dari sisi "reward" berupa finansial bagi tenaga-tenaga muda yang bukan dari tenaga struktural? Dengan demikian, untuk mengukur efektivitas implementasi perubahan kebijakan pengangkatan Pengawas TK/SD tersebut dapat diukur dan dievaluasi secara komprehensif.